

BI DORONG PEMDA PAPUA BARAT TERAPKAN ELEKTRONIFIKASI



SINDOnews.com

Bank Indonesia mendorong semua pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk mengadopsi sistem elektronik dalam transaksi keuangan mereka. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan hal ini ketika mengukuhkan Rommy Sariu Tamawiwiy sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, menggantikan pejabat sebelumnya Rut W Eka Trisilowati di Manokwari. Perry Warjiyo menyatakan bahwa dengan menggunakan sistem elektronik, pengelolaan keuangan akan menjadi lebih efisien dan kuat. Percepatan digitalisasi sistem keuangan dan integrasi ekosistem keuangan pemerintah daerah dapat mencegah kebocoran anggaran. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perry Warjiyo mencontohkan bahwa penerapan sistem elektronik pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mengalami peningkatan drastis pada penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi setelah beralih dari sistem pembayaran konvensional. Komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan sistem keuangan digital diwujudkan melalui pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Pembentukan TP2DD sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Bank Indonesia juga terus berupaya membangun infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung elektronifikasi keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah. Perry Warjiyo menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah meluncurkan Blue Print Sistem Pembayaran (BSP) 2025 sebagai langkah penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, juga menyoroti pentingnya gerakan nasional ketahanan pangan di Papua Barat untuk menjaga inflasi terkendali dan stabilitas daya beli masyarakat.

Paulus Waterpauw, Penjabat Gubernur Papua Barat, menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mewujudkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah. Paulus Waterpauw mengapresiasi peran Rut W Eka Trisilowati dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program-program Bank Indonesia. Tahun 2022, Papua Barat menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan karena berhasil menjaga tingkat inflasi yang relatif stabil di tengah tekanan ekonomi global, prestasi ini diharapkan dapat terus berlanjut berkat dukungan dari Bank Indonesia.

Sumber Berita:

Harian Antara News, “Gubernur BI Dorong Pemda di Papua Barat Terapkan Elektronifikasi”, tanggal 5 Februari 2023.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 16 ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.